

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KOTA SE JAWA TENGAH TAHUN 2007-2014**

Amperawati Laabani

20120430086

Jurusan Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
No. Telp: 0274 387649 (hotline), 0274 387656 ext. 199/200 No. Fax: 0274 387649

INTISARI

Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat terlaksana apabila pemerintah daerah dapat mengelola sumberdaya daerahnya dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, angkatan kerja dan inflasi terhadap PAD di Kota Se Jawa Tengah tahun 2007-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode analisis data panel.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan variabel PDRB, jumlah penduduk, angkatan kerja dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Se Jawa Tengah. Secara parsial variabel PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan angkatan kerja dan inflasi tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Se Jawa Tengah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB, jumlah penduduk, angkatan kerja, inflasi

ABSTRAK

The economic development of a region will be accomplished if the local governments are able to manage their resources and reduce their dependency to the central government. Locally generated revenue is one of the indicators that depicts the level of independency of a region. The higher a receipt of PAD the lower its interdependency to the central government.

This research aims to discover the effect of PDRB, number of population, labor force and inflation on PAD of the cities in Central Java in 2007-2014. The data used in this research was secondary data using panel data analysis method.

The result of the research showed that simultaneously the PDRB, number of population, labor force and inflation variables effected significantly on the local generated revenue (PAD) of the cities in Central Java. Partially, the PDRB and the number of population had positively and significantly affected PAD, while the labor force and inflation did not affect significantly on PAD of the cities in Central Java.

Keywords: *Locally generated revenue (PAD), PDRB, the number of population, labor force, inflation.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah dapat terlaksana dengan maksimal apabila pemerintah daerah dapat mengelola sumberdaya daerahnya sendiri dan mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Agar hal diatas dapat terealisasi dengan baik maka pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Dimana pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Dengan adanya Otonomi Daerah maka pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Sumber-sumber potensi pendapatan yang dimiliki suatu daerah akan mempengaruhi kekuatan keuangan sekaligus menjadi penentu tingkat kemandirian suatu daerah otonom. Salah satu sumber pendapatan daerah yang terbesar berasal dari penerimaan Pendapatas Asli Daerah (PAD). Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk optimal dalam menggali sumber pendapatan dalam rangka memperoleh devisa agar dana tersebut dapat diakumulasikan untuk melaksanakan pembangunan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah memegang peran penting dalam pembiayaan pemerintah daerah dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemeintah daerah. PAD juga menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dibiayai dengan PAD maka semakin tinggi kualitas ononomi suatu daerah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang penerimaan PAD-nya termasuk besar di bandingkan dengan provinsi lainnya. PAD Jawa Tengah menempati posisi ketiga setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, meskipun pertumbuhan ekonominya sendiri hanya lebih besar dari Provinsi DIY. Penerimaan PAD pemeritah kota lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena janis potensi pajak dan retribusi daerah

yang ditarik lebih besar. Berikut disajikan data penerimaan PAD di Kota Se Jawa Tengah tahun 2007-2014.

Tabel 1.1.
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Se Provinsi Jawa Tengah Periode 2007-2014

Tahun	PAD kota Se Provinsi Jawa Tengah					
	Magelang	Surakarta	Salatiga	Semarang	Pekaongan	Tegal
2007	35814845	88034379	36192748	238237999	25737351	62259147
2008	40549584	102989919	45149902	267914150	30104326	69567244
2009	47704619	101972318	52911035	306112423	32238176	90840877
2010	59548102	113977008	52294851	327992259	47495707	101321867
2011	63577702	181096816	60611340	522925031	63344978	117244291
2012	90986302	231672100	63171463	786563412	91205786	156663028
2013	107739839	298400847	106100450	525919311	114252439	176377335
2014	98314069	297026865	92131839	819742241	104202720	166143023

Sumber : Statistik Keuangan Kabupaten/Kota

Dilihat dari tabel di atas Pendapatan Asli daerah Jawa Tengah terus mengalami peningkatan pada 8 tahun terakhir yaitu dari tahun 2007-2014. Kondisi demikian menjadi kabar yang cukup menggembirakan, dimana peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah akan dapat mendorong peningkatan pendapatan secara keseluruhan dan secara otomatis dapat membiayai pengeluaran daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga akan dapat meningkatkan kemampuan daerah Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mirahot.P.Siahaan, 2005). Pendapatan Asli

Daerah merupakan bagian terpenting dalam penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD maka akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepada daerah yang bersifat dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah berdasar atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak dapat digolongkan dalam dua kategori menurut tingkatan pemerintahan daerah yaitu, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun sumber –sumber pajak Provinsi adalah pajak kendaraan bermotor pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air, pajak balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air di permukaan serta pajak rokok. Sedangkan sumber-sumber Pajak Kabupaten/kota adalah pajak hotel, pajak restaurant, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak PBB pedesaan dan perkotaan dan pajak perolehan nama atas tanah dan bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan retribusi daerah berdasar atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

3. Pendapatan Lain-lain Yang Sah

Pendapatan lain –lain yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan daerah, misalnya penerimaan dan sumbangan

pihak ketiga hasil penjualan milik daerah dan penerimaan jasa giro. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa lain – lain PAD yang sah, meliputi Pertama : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Kedua : jasa giro, Ketiga : pendapatan bunga, Keempat : keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Kelima : komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah.

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang mampu diciptakan dalam berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah (H. Saberan, 2002).

Nilai PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan NTB adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/Output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/region dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka NTB adalah

jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB ini termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung neto.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor), di dalam suatu wilayah/region dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Dengan metode ini, penghitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi.

Jumlah Penduduk

Aliran ini dipelopori Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris hidup pada tahun 1766-1834. Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa penduduk apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan pula beberapa bagian bumi.

Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan karena hubungan kelamin laki-laki dan perempuan tidak dapat dihentikan. Disamping itu manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk. Apabila tidak ada pembatasan pertumbuhan penduduk maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan, hal ini menjadi sumber kemiskinan manusia. Untuk dapat keluar dari permasalahan kekurangan pangan, pertumbuhan penduduk harus dibatasi. Menurut Malthus pembatasan dapat dilakukan dua cara yaitu preventive checks dan positive checks. Preventive checks adalah pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran, sedangkan positive checks adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian.

Angkatan Kerja

Prof. Soemitro Djojohadikusumo mendefinisikan angkatan kerja (labor force) sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar

lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi disuatu negara, dimana salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut, yaitu membandingkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja.

Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlansung dalam waktu yang terus-menerus. Menurut teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ini ditandai dengan permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah yang tersedia atau ditawarkan, sehingga dapat menimbulkan “inflationar gap”. Selama inflationary gap ada maka selama itu pula proses inflasi akan berkelanjutan.

METODE ANALISIS

Variabel dependen penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah) dan variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (milliar rupiah), jumlah penduduk (orang), angkatan kerja (orang) dan inflasi (persen) di Kota Se Jawa Tengah selama kurun waktu 8 (delapan) tahun yaitu mulai dari tahun 2007-2014.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang di peroleh dari publikasi instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Model panel data digunakan untuk menganalisis data yang mengandung series dan cross-section. Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu (time series) dan data silang (cross section). Model refresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + b_4X_{4it} + e$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen (PAD)

α : Konstanta

- X1 : Variabel PDRB
- X2 : Variabel Jumlah Penduduk
- X3 : Variabel Angkatan Kerja
- X4 : Variabel Inflasi
- b (1..4): Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- e : Error term
- t : Waktu
- i : Kota Se Jawa Tengah

Dalam analisis regresi data panel menggunakan 3 model yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Untuk memilih model mana yang tepat antara common effect model dan fixed effect model digunakan uji Chow test. Sedangkan untuk memilih fixed effect model dan random effect model pengujian yang digunakan adalah melihat Hausman test.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kausalitas

Penelitian ini menggunakan analisis model GLS (General Least Square). Metode GLS sudah memperhitungkan heteroskedastisitas pada variabel independen agar mampu menghasilkan estimator yang memenuhi syarat kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

1. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1.2.
Uji Heteroskedastisitas (Uji Park)

Variabel	Probabilitas
C	0.4294
LOG(PDRB)	0.6296
LOG(JP)	0.4700
LOG(AK)	0.9220
INFLASI	0.1052

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil analisis dari semua variabel mempunyai probabilitas yang lebih besar dari 5% atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 1.3.
Uji Multikolinearitas

	LOG(PAD)	LOG(PDRB)	LOG(JP)	LOG(AK)	INFLASI
LOG(PAD)	1.000000	0.836355	0.797321	0.799878	0.025114
LOG(PDRB)	0.836355	1.000000	0.970403	0.973142	-0.026613
LOG(JP)	0.797321	0.970403	1.000000	0.998768	-0.025295
LOG(AK)	0.799878	0.973142	0.998768	1.000000	-0.028983
INFLASI	0.025114	-0.026613	-0.025295	-0.028983	1.000000

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya koefisien korelasi yang lebih besar dari 0,9.

Analisis Pemilihan Model Terbaik

1. Uji Chow (Uji Likelihood)

Tabel 1.4.
Uji Chow (Uji Likelihood)

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	110.208603	(5,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	131.563827	5	0.0000

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section* F kurang dari alpha yaitu 0,05 maka pada penelitian ini lebih baik menggunakan model fixed effect.

2. Uji Huasman

Tabel 5.4.
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	550.843134	4	0.0000

Sumber : Data diolah

H_0 = menggunakan model Random Effects

H_1 = menggunakan model Fixed Effect

Berdasarkan hasil uji hausman di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari derajat kepercayaan yaitu 5% atau 0,05 maka model yang lebih baik digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 5.6
Model Fixed Effect

Variabel Dependen : PAD	Model Fixed Effect
Konstanta	-43,73562
Standar Error	8,236733
Probabiloitas	0,0000
Log(PDRB)	3,504503
Standar Error	0,166728
Probabiloitas	0,0000
Log(Jumlah Penduduk)	1,627090
Standar Error	0,667196
Probabiloitas	0,0195
Log(Angkatan Kerja)	-0,852256
Standar Error	0,639327
Probabiloitas	0,1905
Inflasi	-0,002452
Standar Error	0,007899
Probabiloitas	0,7579
R²	0,980993
F_{statistik}	217,9163

Probabilitas	0,000000
Durbin-Waston Stat	1,621860

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil uji penelitian dengan model di atas, dapat di buat analisis dan pembahasan mengenai bagaimana pengaruh variabel independen yang terdiri dari PDRB, jumlah penduduk, angkatan kerja dan inflasi terhadap variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Se Jawa Tengah, sebagai barikut:

1. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil data yang telah di olah, PDRB menunjukkan tanda positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pada tingkat kepercayaan 5%. Koefisien PDRB sebesar 1,972883 yang artinya jika variabel PDRB naik 1 persen maka variabel PAD akan naik sebesar 3,504503 persen dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. Variabel PDRB memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap variabel PAD dengan nilai probabilitas 0.0000 pada derajat kepercayaan 5% atau 0,05 dan sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis diterima.

Sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengemukakan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). salah satunya penelitian dilakukan oleh Ifan Restu Bagus Pamungkas, 2013.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk (JP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Nilai koefisien jumlah penduduk sebesar 1,627090 maka jika

variabel jumlah penduduk naik 1 orang maka variabel PAD akan naik sebesar 1,627090 juta rupiah dengan ketentuan variabel bebas lainnya bersifat tetap. Variabel jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap variabel PAD dengan nilai probabilitas sebesar 0.0195, dimana derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menduga adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erna Efriana, 2014 dan Prabuya Budi santosa, 2005. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan mutu dan kualitas tinggi akan meningkatkan kemampuan produktifitasnya. Tingginya produktifitas penduduk akan berpengaruh terhadap kemampuannya dalam membayar pungutan seperti pajak yang nantinya berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah akan meningkat dengan penduduk yang produktif (dapat menciptakan lapangan pekerjaan).

3. Pengaruh Angkatan Kerja (AK) terhadap Pendapatan Asli daerah

Berdasarkan hasil data yang telah diolah dalam penelitian ini, variabel angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pendapatan asli daerah. Angkatan kerja memiliki nilai koefisien sebesar -0,852256 maka jika variabel angkatan kerja naik 1 orang variabel PAD akan turun sebesar -0,852256 juta rupiah dengan ketentuan variabel bebas lainnya bersifat tetap. Variabel angkatan kerja memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap variabel PAD dengan nilai probabilitas sebesar 0.1905, dimana derajat kepercayaan yang digunakan adalah

5% atau 0,05. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menduga adanya hubungan positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Se Jawa Tengah.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Pahala Bellarminus Lumban Tobing (2015) yang menjelaskan bahwa angkatan kerja tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kenaikan angkatan kerja dapat memicu terjadinya peningkatan terhadap angka pengangguran, yang disebabkan oleh kurang tersedianya lapangan pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh angkatan kerja akan menyebabkan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik karena terjadinya kualifikasi antara angkatan kerja yang berpendidikan tinggi dengan yang berpendidikan rendah. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan terhadap kualitas pendidikan dan keterampilan dengan mengadakan pelatihan untuk mengembangkan keahlian dan mengembangkan kreatifitas agar angkatan kerja yang tersedia memiliki daya saing dan kualitas yang baik. Dengan mutu dan kualitas yang baik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kemampuan dalam membayar kewajiban seperti membayar pajak dan retribusi.

4. Pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang di atas menjelaskan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD. nilai koefisien inflasi sebesar -0,002452 maka jika variabel inflasi naik 1 persen maka variabel PAD akan turun sebesar -0,002452 juta rupiah dengan ketentuan variabel bebas lainnya tidak berubah. Variabel inflasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel PAD dengan nilai probabilitas sebesar 0.9628, dimana derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian ini yang

menduga bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iwan Susanto karena inflasi merupakan dampak penggerak ekonomi secara positif ataupun negatif. Penelitian lain yang juga mendukung adalah penelitian Muchtholifah yang menyatakan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena pemerintah belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan kebijakan untuk kestabilan perekonomian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data dan pembahasan mengenai hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel PDRB yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di daerah kota Se Jawa Tengah. Hal ini kerana PDRB konstan secara regional telah ditetapkan 9 subsektor, dan subsektor tersebut merupakan penggerak ekonomi. Semakin PDRB meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat, yang mana kesejahteraan masyarakat ditandai dengan naiknya tingkat pendapatan perkapita. Kenaikan pendapatan perkapita berarti kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan seperti pajak juga meningkat.
2. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Se Jawa Tengah. Hal ini berarti pertumbuhan jumlah penduduk yang di sertai dengan kualitas pendidikan tinggi serta kesehatan yang baik, akan dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan.

Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula yang membayar berbagai pungutan/iuran seperti pajak yang ditetapkan pemerintah sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah. Namun, jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban apabila struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga menuntut palayanan sosial dan tingkat produktifitasnya rendah yang menyebabkan hanya menjadi tanggungan penduduk yang bekerja efektif.

3. Variabel Angkatan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Se Jawa Tengah. Hal ini terjadi karena apabila jumlah angkatan kerja di tambah terus menerus sedangkan faktor produksi yang lainnya dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di masyarakat. Penyebab lainnya yaitu rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja dan masih kurangnya keahlian yang dimiliki menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.
4. Variabel Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut karena, ketika inflasi tinggi akan mempengaruhi produktifitas perekonomian yang dapat mengurangi daya beli masyarakat dan perolehan pendapatan asli daerah yang biasanya di peroleh dari pajak dan retribusi daerah.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. PDRB terbukti memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan asli daerah, yang artinya ketika PDRB meningkat maka PAD juga akan meningkat. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan jumlah faktor produksi. Sehingga peningkatan produksi dapat mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat dan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Se Jawa Tengah melalui pemungutan pajak dan retribusi.
2. Dilihat dari hasil penelitian jumlah penduduk memberikan dampak positif terhadap PAD sehingga perlu terus meningkatkan kualitas penduduk dan memaksimalkan pemberdayaan penduduk dengan memberikan pelatihan bagaimana cara berwirausaha atau menciptakan usaha-usaha baru, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada perusahaan dan industri. Selain itu, perlunya mengintensifkan pengawasan wajib pajak bagi penduduk yang produktif dan memacu masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana yang baik untuk meningkatkan mobilitas serta produktifitas masyarakat daerah.
3. Hasil penelitian menunjukkan variabel angkatan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan serta rendahnya tingkat pendidikannya. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan mutu pendidikan serta memberikan pelatihan agar dapat menambah wawasan dan kreatifitas agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
4. Inflasi memberikan dampak negatif terhadap PAD, maka diperlukan pengendalian inflasi. Salah satu caranya dengan mensubsidi bahan-bahan pokok, karena tingginya permintaan terhadap kebutuhan bahan pokok menjadi penyebab kenaikan harga yang memicu terjadinya inflasi. Selain itu pengendalian inflasi dapat melalui pemberian

peringatan dan sanksi terhadap penggunaan BBM pada kendaraan mewah dengan menaikkan pajak kendaraan bagi yang melanggar.

Daftar Pustaka

- Agus Tri Basuki. 2015. *Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Danisa Media, Banyuwangi V/15 Banyuwangi, Gamping Sleman
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
- Dorbush, Rudiger & Fisher Stanley. 1992. *Makro Ekonomi*. Edisi Keempat, Terjemahan J. Mulyadi, Erlangga, Jakarta
- Drs. Rozy Munir MSc., Drs. Budoarto. 1986. *Teori – teori kependudukan*. PT. Bina Askara, Jakarta
- Erna Efriana, 2014, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Surakarta tahun 1991-2012”
- Ifan Restu Bagu Pamungkas, 2013, “Analisis Pengaruh PMDN, PMA, dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati tahun 1982-2011”, *Economics Development Analysis Journal*, Vol.2, No.4, November 2013
- Iwan Susanto, 2014, “Analisis pengaruh PDRB, penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus Kota Malang tahun 1998-2012” jurnal ilmiah
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi*, Erlangga, Jakarta
- Muchtholifah, 2010, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, investasi industri dan jumlah tenaga kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Mojokerto”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, Vol.1 No.1, Januari 2010
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter*. BPFE. UGM, Yogyakarta

Pahala Bellarminus Lumban Tobing, 2015), “Analisis pengaruh jumlah pekerja, pengeluaran pemerintah dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 1999-2013 dengan studi pada Malang Raya”

Prabuya Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu, 2005, “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam upaya Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri”, *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol.2 No.1, Juli 2005 : 9-8

Saberan, H. 2002. *Produk Domestik Regional Bruto*. Rajawali, Jakarta

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta

Yudo Swasono, Endang Sulistyarningsih. 1983. *Metode Perencanaan Tenaga Kerja*. BPPF Yogyakarta